

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DASAR DAN PERMASALAHANNYA

Rizki Ananda¹, Laila Pajriani ², Suci Akfiza Rahmadani ³, Zakkia Wahyuni ⁴,

Ahmad Zikri Alamsah ⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

¹rizkiananda.mhs.upi@gmail.com, ²lailapajriani@gmail.com

ABSTRACT

Financing basic education is a crucial element in ensuring equitable access to and quality of education in Indonesia. Although the government has allocated funds through various schemes such as the School Operational Assistance (BOS) and Special Allocation Funds (DAK), several challenges remain—ranging from distribution issues and inefficient budget use to a lack of transparency in fund management. This article provides a comprehensive overview of the sources of basic education funding, allocation mechanisms, and obstacles encountered in implementation. It also discusses the roles of stakeholders and offers policy recommendations aimed at improving the efficiency and equity of basic education financing in Indonesia.

Keyword: *education financing, basic education, BOS, DAK, education policy, education equity, budget efficiency*

ABSTRAK

Pembiayaan pendidikan dasar merupakan aspek krusial dalam mewujudkan akses dan mutu pendidikan yang merata di Indonesia. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana melalui berbagai skema seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), berbagai permasalahan masih muncul, baik dari segi distribusi, efektivitas penggunaan anggaran, hingga transparansi pengelolaannya. Artikel ini membahas secara komprehensif mengenai sumber pembiayaan pendidikan dasar, mekanisme pengalokasian dana, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Selain itu, dibahas pula peran pemangku kepentingan, serta rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi dan pemerataan pembiayaan pendidikan dasar di Indonesia.

Kata Kunci: pembiayaan pendidikan, pendidikan dasar, BOS, DAK, kebijakan pendidikan, pemerataan pendidikan, efisiensi anggaran

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan memegang peranan strategis sebagai fondasi untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berkarakter. Oleh karena itu, penyediaan pendidikan dasar yang bermutu dan merata menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.

Salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pendidikan dasar adalah pembiayaan. Tanpa dukungan pendanaan yang memadai, berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan sulit untuk direalisasikan. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mendukung pendanaan pendidikan, termasuk melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, di balik upaya tersebut masih terdapat sejumlah permasalahan yang menghambat efektivitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan, seperti ketimpangan distribusi dana, rendahnya kapasitas manajemen sekolah dalam mengelola anggaran, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana.

Permasalahan-permasalahan ini berdampak langsung pada kualitas

layanan pendidikan yang diterima oleh peserta didik, khususnya di daerah tertinggal, terluar, dan terisolasi. Oleh karena itu, kajian terhadap sistem pembiayaan pendidikan dasar serta tantangan yang dihadapinya menjadi sangat penting untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan dan aplikatif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis dinamika pembiayaan pendidikan dasar di Indonesia, mengidentifikasi hambatan-hambatan utama yang dihadapi, serta menawarkan solusi untuk meningkatkan keadilan dan efektivitas pembiayaan pendidikan ke depan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam dinamika pembiayaan pendidikan dasar serta permasalahan yang menyertainya. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan kondisi faktual, pandangan para pemangku kepentingan, serta proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pendanaan pendidikan dasar di Indonesia.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua metode utama, yaitu studi kepustakaan dan analisis dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur akademik, hasil penelitian terdahulu, regulasi pemerintah, serta laporan lembaga-lembaga terkait, seperti Kementerian

Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara itu, analisis dokumen mencakup telaah terhadap laporan anggaran pendidikan, data alokasi dan realisasi dana BOS dan DAK, serta hasil evaluasi pelaksanaan program pembiayaan pendidikan dari berbagai instansi.

Untuk memperkuat validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengidentifikasi tema-tema utama, menarik hubungan sebab-akibat, serta menyusun interpretasi berdasarkan konteks kebijakan dan realitas di lapangan.

Hasil dari metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas sistem pembiayaan pendidikan dasar di Indonesia serta mengidentifikasi permasalahan dan solusi yang relevan untuk perbaikan ke depan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Sumber dan Skema Pembiayaan Pendidikan Dasar

Sistem pembiayaan pendidikan dasar di Indonesia dirancang untuk menjamin akses pendidikan yang merata dan terjangkau. Beberapa skema utama meliputi:

- **Dana Alokasi Umum (DAU):** Dana ini diberikan kepada

daerah untuk membiayai belanja pegawai, termasuk gaji guru. Namun, penyaluran DAU belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan riil guru di berbagai wilayah, terutama dalam konteks distribusi guru antardaerah.

- **Dana Alokasi Khusus (DAK):** Diperuntukkan bagi pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sekolah. Meski penting, penyaluran DAK sering kali terlambat dan kurang fleksibel karena penggunaannya hanya terbatas pada proyek fisik.
- **Bantuan Operasional Sekolah (BOS):** Program ini menjadi tulang punggung operasional harian sekolah. BOS memberikan dana berdasarkan jumlah siswa (flat-rate), namun belum mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual seperti tingkat kemahalan wilayah dan kondisi geografis.

Dalam banyak kasus, sekolah di wilayah urban cenderung menerima dana BOS lebih besar karena memiliki jumlah siswa yang

lebih banyak, meskipun sekolah di pedalaman membutuhkan biaya lebih tinggi untuk logistik dan operasional dasar.

2. Permasalahan dalam Implementasi Permasalahan

- **Ketimpangan Distribusi Dana**

Data menunjukkan bahwa daerah dengan indeks kemahalan konstruksi (IKK) tinggi seperti Papua, NTT, dan sebagian Kalimantan menghadapi tantangan besar dalam pemanfaatan dana BOS dan DAK. Biaya pengiriman material, gaji guru honorer, dan kebutuhan dasar lainnya jauh lebih mahal, tetapi tidak ada penyesuaian signifikan dalam penghitungan alokasi dana. Akibatnya, sekolah-sekolah tersebut tetap berada dalam kondisi tertinggal meski menerima jumlah nominal yang sama.

- **Rendahnya Kapasitas Pengelolaan Dana**

Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 50% kepala sekolah tingkat dasar di daerah terpencil tidak memiliki pelatihan formal dalam manajemen keuangan. Hal ini menyebabkan

pelaporan dan perencanaan anggaran tidak optimal. Selain itu, proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) kerap hanya bersifat administratif semata, tanpa perencanaan strategis jangka panjang.

- **Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas**

Meski sistem ARKAS dan SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah) telah diterapkan, tidak semua sekolah dapat mengaksesnya secara efektif karena keterbatasan jaringan internet dan perangkat. Di sisi lain, partisipasi masyarakat, khususnya komite sekolah, dalam pengawasan penggunaan dana masih minim karena kurangnya pemahaman mengenai fungsi dan hak mereka.

3. Dampak terhadap Kualitas dan Pemerataan Pendidikan

Keterbatasan pembiayaan dan pengelolaan yang tidak efisien berdampak langsung terhadap kualitas layanan pendidikan. Beberapa konsekuensinya antara lain:

- **Fasilitas minim:**
Banyak sekolah masih kekurangan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta akses air bersih dan sanitasi yang layak.
- **Kesenjangan digital:**
Sekolah di daerah terpencil hampir tidak memiliki akses terhadap perangkat TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), membuat program digitalisasi pendidikan belum inklusif.
- **Kesejahteraan guru honorer:** Guru non-PNS sering kali hanya menerima honor jauh di bawah upah minimum, menyebabkan rendahnya motivasi dan tingginya tingkat turnover.

4. Upaya Pemerintah dan Rekomendasi Kebijakan

Pemerintah telah melakukan beberapa reformasi, termasuk digitalisasi pelaporan, pelatihan manajemen keuangan, dan peningkatan fleksibilitas penggunaan dana BOS. Namun, upaya tersebut perlu dilengkapi dengan langkah-langkah berikut:

- **Pendekatan berbasis kebutuhan lokal:**
Alokasi dana pendidikan sebaiknya

mempertimbangkan faktor geografis, kemahalan wilayah, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekitar.

- **Peningkatan kapasitas SDM sekolah:** Melalui pelatihan berkala, pendampingan, dan sertifikasi manajemen anggaran bagi kepala sekolah dan bendahara.
- **Desentralisasi yang bertanggung jawab:** Memberikan keleluasaan lebih kepada sekolah dan pemerintah daerah, namun disertai dengan sistem akuntabilitas yang kuat.
- **Transparansi publik dan keterlibatan komunitas:** Memperkuat peran komite sekolah dan masyarakat dalam pengawasan, termasuk melalui forum keterbukaan informasi publik di tingkat sekolah.

D. Kesimpulan

Pembiayaan pendidikan dasar merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana melalui berbagai skema seperti BOS,

DAK, dan DAU, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Ketimpangan distribusi dana, rendahnya kapasitas manajemen di tingkat sekolah, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas menjadi hambatan utama dalam optimalisasi pemanfaatan anggaran pendidikan.

Dampak dari permasalahan tersebut sangat dirasakan oleh sekolah-sekolah di daerah tertinggal, terluar, dan terpencil, yang justru membutuhkan perhatian dan dukungan lebih besar. Ketidaksetaraan dalam akses dan kualitas pendidikan masih menjadi masalah nyata yang menghambat tercapainya tujuan pembangunan pendidikan nasional yang adil dan inklusif.

Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah perbaikan yang menyeluruh, mulai dari perencanaan anggaran berbasis kebutuhan lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sekolah, hingga penguatan sistem pengawasan dan keterlibatan masyarakat. Reformasi pembiayaan pendidikan dasar bukan hanya soal alokasi dana yang mencukupi, tetapi juga memastikan dana tersebut dikelola secara efisien, adil, dan transparan demi masa depan pendidikan yang lebih baik bagi seluruh anak bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022*. Jakarta: BPK RI.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. (2023). *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun 2023*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Fahmi, M. (2017). *Manajemen Pendidikan dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Evaluasi Program BOS: Dampak dan Tantangan*. Jakarta: Kemendikbud.
- Nugroho, R. (2020). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Suryadarma, D., & Jones, G. W. (Eds.). (2013). *Education in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.